



Implementasi Program Dana Desa (DD) di Desa Tote Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Kelfin Dulung^{1*}, Ismet Sulila², Yacob Noho Nani³

¹⁻³ Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: dulungk@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the Village Fund (Dana Desa/DD) Program in Tote Village, Bolangitang Barat Subdistrict, North Bolaang Mongondow Regency. The study focuses on the implementation of the Village Fund policy as viewed from several aspects, namely (a) organizational capacity, (b) information dissemination, (c) community support, and (d) the distribution of village potential. This study employed a qualitative, descriptive research approach. Data sources were obtained through in-depth interviews with village officials and community members, supported by observation and documentation. The results showed that the implementation of the Village Fund Program in Tote Village has not been fully optimal. This is indicated by the limited organizational capacity of village apparatus, uneven dissemination of information to the community, and relatively low community participation and support in several Village Fund programs. In addition, the distribution of village potential in program implementation has not been entirely well-targeted. Nevertheless, the Village Fund Program has contributed positively to infrastructure development and the economic empowerment of the village community. It can be concluded that improving the implementation of the Village Fund Program requires strengthening village officials capacity, enhancing transparency and information dissemination, and actively involving the community in the planning, implementation, and supervision of the program.*

Keywords: Policy Implementation; Public Administration; Tote Village; Village Development; Village Fund.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Dana Desa (DD) di Desa Tote, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan Dana Desa dilihat dari beberapa aspek, yaitu (a) kemampuan organisasi, (b) penyebaran informasi, (c) dukungan masyarakat, dan (d) pembagian potensi desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, serta masyarakat, yang didukung dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Dana Desa di Desa Tote belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih terbatasnya kemampuan organisasi aparatur desa, penyebaran informasi yang belum merata kepada masyarakat, serta partisipasi dan dukungan masyarakat yang masih rendah dalam beberapa program Dana Desa. Selain itu, pembagian potensi desa dalam pelaksanaan program belum sepenuhnya tepat sasaran. Meskipun demikian, Program Dana Desa telah memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan implementasi Program Dana Desa dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan transparansi dan penyebaran informasi, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program.

Kata kunci: Administrasi Publik; Dana Desa; Desa Tote; Implementasi Kebijakan; Pembangunan Desa.

1. LATAR BELAKANG

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan untuk mendukung pemerataan kapasitas keuangan antar desa. Dana ini digunakan untuk berbagai kebutuhan desa, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. DD merupakan bagian dari anggaran desa yang disalurkan melalui Kas Desa. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, alokasi Dana Desa minimal sebesar 10% dari dana transfer daerah dalam APBN (Ramadhan & Ma'ruf, 2022)

Naskah Masuk: 10 Januari 2026; Revisi: 12 Februari 2026; Diterima: 09 Maret 2026; Terbit: 11 Maret 2026

Desa Tote Pada tahun 2024 mengalokasikan Dana Desa (DD) sebesar Rp 644.025.000,00 untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu program prioritas adalah pembuatan jalan perkebunan yang menyerap anggaran sebesar Rp 152.363.375,00, bertujuan untuk memperbaiki akses menuju area perkebunan demi mendukung aktivitas ekonomi warga. Selain itu, program penimbunan lapangan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 156.953.875,00, yang kemungkinan digunakan untuk meratakan dan memperbaiki fasilitas lapangan desa sebagai ruang kegiatan sosial dan olahraga. Untuk mendukung sektor pertanian, desa menganggarkan Rp 135.679.056,00 untuk pengadaan alat-alat tani, serta Rp 10.089.000,00 untuk pengadaan bibit rica (cabai), yang merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi. Di sektor perikanan, dana sebesar Rp 115.339.649,00 digunakan untuk pengadaan alat-alat nelayan guna meningkatkan hasil tangkapan dan kesejahteraan para nelayan desa. Sementara itu, sebesar Rp 75.600.000,00 dialokasikan untuk Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Tote yang diperkuat dengan wawancara terhadap beberapa masyarakat, masih ditemukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program Dana Desa. Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan perkebunan yang pada awalnya direncanakan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian. Namun pada kenyataannya, jalan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh petani karena letaknya kurang strategis dan belum menjangkau seluruh area perkebunan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur administratif, dari segi ketepatan sasaran masih terdapat kekurangan. Program dapat dikatakan tepat sasaran apabila direncanakan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar warga. Sebaliknya, program yang kurang tepat sasaran adalah program yang terlaksana secara administratif tetapi belum memberikan dampak yang maksimal atau hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari penyampaian informasi dan masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, di mana sebagian masyarakat belum sepenuhnya terlibat aktif dalam menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka. Akibatnya, program yang ditetapkan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Administrasi Publik

Menurut Nigro (1980) dalam (Gani dan Suparman, 2023), administrasi publik mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun hukum. Definisi ini menyoroti bahwa administrasi publik tidak terbatas pada lembaga eksekutif, tetapi juga melibatkan legislatif dan yudikatif dalam pelaksanaan kebijakan publik. Administrasi publik harus berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan negara dan masyarakat melalui tata kelola yang baik dan transparan.

Konsep Implementasi

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik karena menentukan tercapai atau tidaknya tujuan yang telah dirumuskan. Herdiana (2018) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan program yang melibatkan berbagai aktor serta membutuhkan koordinasi yang efektif. Ia menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan aparat pelaksana dan dukungan lingkungan kebijakan.

Konsep Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi dasar dalam merancang serta melaksanakan tugas kepemimpinan, termasuk dalam pengambilan tindakan yang berkaitan dengan perintah, organisasi, dan aspek lainnya.

Konsep Implementasi Kebijakan

Agustino (2008: 158) dalam (Tahir, 2020) menyatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dapat diambil, yaitu langsung mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan atau melalui formulasi kebijakan turunan atau derivat dari kebijakan publik tersebut.

Konsep Dana Desa

Dana Desa merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di desa melalui alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat desa dengan memberikan otonomi lebih luas kepada pemerintah desa untuk mengelola anggaran mereka secara mandiri.

Dengan adanya Dana Desa, desa memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, ekonomi lokal, dan pelayanan sosial.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus sebagai strategi utama untuk memahami fenomena yang diteliti secara mendalam dan kontekstual. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam bersama informan yang berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah, serta penelaahan dokumen terkait kebijakan dan program yang telah diimplementasikan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, yang bertujuan untuk menemukan pola-pola serta keterkaitan antarvariabel yang menjadi fokus penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, implementasi Program Dana Desa di Desa Tote Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dianalisis berdasarkan empat indikator utama menurut Warwick, yaitu: kemampuan organisasi, penyebaran informasi, dukungan, dan pembagian potensi.

Kemampuan Organisasi

Kemampuan organisasi pemerintah Desa Tote dalam mengimplementasikan Program Dana Desa secara umum telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa serta penyusunan RKPDes dan APBDes. Struktur organisasi pemerintahan desa telah terbentuk dengan pembagian tugas yang jelas antarperangkat desa. Koordinasi dengan pihak kecamatan dan pendamping desa juga berjalan secara rutin dalam menyelesaikan persoalan teknis. Dari sisi administrasi keuangan, pengelolaan anggaran dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa secara formal kemampuan organisasi berada pada kategori cukup baik.

Namun demikian, secara substantif masih terdapat ruang perbaikan terutama dalam aspek ketepatan sasaran program. Beberapa program, seperti pembangunan jalan perkebunan, belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sesuai tujuan awalnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan organisasi tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif, tetapi juga dari efektivitas dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan berbasis kebutuhan riil menjadi

penting untuk diperhatikan. Penguatan kompetensi teknis dan analisis kebutuhan akan meningkatkan kualitas kebijakan di tingkat desa. Dengan demikian, kemampuan organisasi perlu terus dikembangkan agar lebih adaptif dan berdampak nyata.

Informasi

Aspek informasi dalam implementasi Dana Desa di Desa Tote menunjukkan adanya upaya transparansi dari pemerintah desa. Informasi mengenai jumlah anggaran dan jenis program disampaikan melalui musyawarah desa serta pemasangan papan informasi anggaran. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola yang terbuka dan akuntabel. Masyarakat secara umum mengetahui adanya program pembangunan dan bantuan sosial yang bersumber dari Dana Desa. Transparansi administratif telah dijalankan sesuai prinsip keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, dari sisi penyediaan informasi, pelaksanaan Dana Desa telah memenuhi aspek formal transparansi.

Meskipun demikian, efektivitas penyebaran informasi masih belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh proses perencanaan dan dasar penetapan prioritas program. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan masih bersifat informatif dan belum sepenuhnya partisipatif. Keterbatasan partisipasi dalam forum musyawarah desa turut memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap kebijakan. Transparansi yang efektif tidak hanya menuntut keterbukaan data, tetapi juga pemahaman publik terhadap isi kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sosialisasi dan dialog dua arah menjadi langkah strategis untuk memperkuat legitimasi kebijakan.

Dukungan

Dukungan masyarakat terhadap implementasi Dana Desa di Desa Tote tergolong cukup baik. Masyarakat terlibat dalam musyawarah desa dan berpartisipasi dalam beberapa kegiatan pembangunan. Program yang bersifat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti bantuan sosial dan pengadaan sarana produksi, memperoleh respons positif. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya legitimasi sosial terhadap kebijakan desa. Dukungan ini menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan desa. Secara umum, lingkungan kebijakan memberikan dukungan yang kondusif terhadap implementasi Dana Desa.

Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat belum merata pada seluruh tahapan kebijakan. Keterlibatan dalam perencanaan dan pengawasan masih perlu diperkuat agar tidak bersifat formalitas semata. Sebagian masyarakat belum secara aktif menyampaikan aspirasi dan kebutuhan dalam forum musyawarah. Kondisi ini berpotensi memengaruhi ketepatan

sasaran program yang ditetapkan. Dukungan yang kuat tidak hanya diukur dari kehadiran fisik, tetapi juga dari kontribusi substantif dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penguatan partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Pembagian Potensi

Pembagian potensi dalam implementasi Dana Desa di Desa Tote diarahkan pada sektor-sektor strategis sesuai karakteristik desa. Program pembangunan difokuskan pada sektor pertanian, perikanan, infrastruktur, dan bantuan sosial. Pengadaan alat pertanian, alat nelayan, serta bantuan bibit menjadi bentuk pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur seperti jalan perkebunan dimaksudkan untuk mendukung aktivitas produksi masyarakat. Diversifikasi program menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam mendistribusikan manfaat secara luas. Secara konseptual, pembagian potensi telah mempertimbangkan kebutuhan umum masyarakat desa.

Akan tetapi, efektivitas distribusi manfaat program masih perlu ditingkatkan. Tidak seluruh program memberikan dampak yang merata bagi seluruh kelompok masyarakat. Ketepatan sasaran menjadi tantangan utama dalam memastikan bahwa manfaat Dana Desa dirasakan secara luas. Perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis data kebutuhan masyarakat dapat memengaruhi kualitas pembagian potensi. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan dampak kebijakan. Dengan perencanaan yang lebih partisipatif dan terukur, pembagian potensi Dana Desa dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan

Implementasi Program Dana Desa Di Desa Tote Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan bagaimana kompleksitas pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal seringkali dipengaruhi oleh empat indikator dari teori Warwic.

Kemampuan Organisasi

Kemampuan organisasi Pemerintah Desa Tote dalam mengelola Dana Desa dapat dilihat dari konsistensi pelaksanaan tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan RKPDes dan APBDes dilaksanakan melalui forum musyawarah desa dengan melibatkan perangkat desa serta unsur masyarakat sebagai bentuk partisipasi bersama. Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola administrasi dijalankan berdasarkan prosedur formal dan tidak diputuskan secara sepihak oleh pemerintah desa. Dokumen-dokumen perencanaan disusun secara terstruktur, sistematis, serta terdokumentasi secara rapi sesuai standar

administrasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kapasitas administratif yang cukup memadai dalam mendukung fungsi organisasi pemerintahan desa. Dengan demikian, dari sisi prosedural, pemerintah desa mencerminkan kemampuan organisasi yang tergolong baik serta kepatuhan terhadap regulasi sebagai landasan implementasi kebijakan publik di tingkat desa.

Temuan penelitian ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kapasitas organisasi desa merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi Dana Desa. Febriyanti, Yusuf Qamaruddin, dan Rajiman (2023) menemukan bahwa keterbatasan kapasitas teknis aparatur desa dapat memengaruhi efektivitas program meskipun secara administratif telah berjalan sesuai prosedur. Yusran, Pananrangi, dan Bahri (2021) juga menyimpulkan bahwa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia menjadi kendala dalam optimalisasi pembangunan desa. Hasil tersebut sejalan dengan temuan di Desa Tote bahwa kemampuan organisasi yang baik secara administratif perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas teknis dan kemampuan analisis kebutuhan. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mampu menghasilkan dampak yang tepat sasaran.

Informasi

Aspek informasi dalam implementasi Dana Desa di Desa Tote menunjukkan adanya komitmen transparansi dari pemerintah desa. Transparansi diwujudkan melalui pemasangan papan informasi anggaran dan penyampaian laporan dalam musyawarah desa. Informasi mengenai jumlah anggaran dan jenis kegiatan dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui penggunaan Dana Desa. Langkah ini mencerminkan upaya membuka akses informasi kepada publik. Keterbukaan tersebut merupakan bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, transparansi berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan demikian, secara formal aspek informasi telah dijalankan sesuai prinsip akuntabilitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Diana Damayanti (2021) yang menyatakan bahwa kelemahan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dapat menghambat efektivitas implementasi Dana Desa. Firmansyah, Susetyo, dan Sumira (2020) juga menemukan bahwa transparansi administratif belum tentu menjamin pemahaman masyarakat secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran desa. Kondisi tersebut tercermin di Desa Tote, di mana papan informasi telah tersedia namun pemahaman masyarakat terhadap detail program masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum sepenuhnya diikuti dengan komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, penguatan strategi komunikasi yang

lebih dialogis dan partisipatif menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan.

Dukungan

Dukungan berbagai pihak menjadi elemen penting dalam keberhasilan implementasi Program Dana Desa. Di Desa Tote, dukungan masyarakat terlihat dari keterlibatan dalam musyawarah desa dan kegiatan pembangunan. Partisipasi tersebut menunjukkan adanya penerimaan terhadap kebijakan pemerintah desa. Keterlibatan dalam perencanaan juga menjadi indikator pembangunan partisipatif karena masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan. Hal ini mencerminkan hubungan yang cukup baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Dukungan sosial menjadi modal utama dalam pelaksanaan program, karena tanpa partisipasi masyarakat pembangunan tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, aspek dukungan dan partisipasi menjadi bagian krusial dalam analisis implementasi kebijakan.

Temuan ini didukung oleh penelitian Pitono dan Kartiwi (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan sering kali masih bersifat formalitas dan belum aktif dalam pengawasan. Perseveranda dan Lawalu (2022) juga menemukan bahwa meskipun Dana Desa mendorong pembangunan infrastruktur, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi masih terbatas. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan di Desa Tote, di mana dukungan masyarakat telah ada namun belum sepenuhnya substantif. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan partisipasi yang lebih aktif dan berkelanjutan. Partisipasi yang kuat akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap program pembangunan desa. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pembagian Potensi

Pembagian potensi manfaat Program Dana Desa menjadi indikator penting dalam menilai keadilan dan efektivitas kebijakan di tingkat desa. Di Desa Tote, alokasi program diarahkan pada sektor pertanian, perikanan, infrastruktur, dan bantuan sosial sesuai karakteristik desa. Pertanian dan perikanan menjadi potensi utama yang dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur turut mendukung aktivitas produksi dan distribusi hasil usaha. Bantuan sosial seperti BLT diberikan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat rentan. Diversifikasi program ini menunjukkan upaya pemerataan pembangunan. Dengan demikian, pembagian potensi telah mempertimbangkan kebutuhan umum masyarakat desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Firmansyah dkk. (2020) yang menyatakan bahwa Dana Desa mampu mendorong pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi, namun pemerataan manfaat dan ketepatan sasaran masih menjadi tantangan. Febriyanti dkk. (2023) juga menunjukkan bahwa perbedaan prioritas kebutuhan antar kelompok masyarakat dapat memengaruhi efektivitas distribusi manfaat program. Dalam konteks Desa Tote, pembagian potensi telah diarahkan pada sektor unggulan seperti pertanian dan perikanan, tetapi evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan agar dampaknya merata. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh alokasi sektor, tetapi juga oleh ketepatan sasaran. Oleh karena itu, penguatan perencanaan berbasis data dan partisipasi masyarakat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pembagian potensi Dana Desa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Dana Desa di Desa Tote Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan secara umum telah berjalan cukup baik sesuai konsep implementasi kebijakan menurut teori Warwick. 1. Pembagian Potensi, Pemerintah desa telah melaksanakan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, efektivitas implementasi masih menghadapi kendala dalam ketepatan sasaran program, khususnya pada pembangunan jalan perkebunan yang belum dimanfaatkan secara optimal. 2. Dari aspek informasi, transparansi telah dilakukan melalui musyawarah dan papan informasi anggaran. Meskipun demikian, pemahaman masyarakat terhadap detail perencanaan dan pelaksanaan program belum sepenuhnya merata. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi sudah ada, tetapi efektivitas penyampaiannya masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, secara administratif kebijakan telah berjalan baik, namun kualitas implementasi masih perlu penguatan. 3. Dari aspek dukungan, partisipasi masyarakat tergolong cukup baik melalui keterlibatan dalam musyawarah dan kegiatan pembangunan desa. Namun, partisipasi tersebut belum merata dan belum sepenuhnya aktif dalam proses pengawasan dan evaluasi program. 4. Pembagian potensi Dana Desa telah diarahkan pada sektor strategis seperti pertanian, perikanan, infrastruktur, dan bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pengadaan sarana produksi dan BLT menunjukkan adanya upaya pemerataan manfaat pembangunan. Meskipun demikian, efektivitas dan ketepatan sasaran program tetap memerlukan evaluasi berkala agar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Secara keseluruhan, implementasi Dana Desa telah memberikan kontribusi positif bagi

pembangunan desa. Akan tetapi, perbaikan pada aspek ketepatan sasaran, transparansi yang lebih efektif, dan penguatan partisipasi masyarakat masih menjadi kebutuhan penting ke depan.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 1.) pemerintah Desa Tote disarankan untuk meningkatkan ketepatan perencanaan program melalui pemetaan kebutuhan masyarakat yang lebih mendalam sebelum menetapkan prioritas pembangunan. Transparansi juga perlu diperkuat tidak hanya melalui papan informasi anggaran, tetapi melalui sosialisasi rutin, pemanfaatan media sosial desa, serta forum diskusi masyarakat. Langkah ini penting agar seluruh warga memahami penggunaan Dana Desa secara menyeluruh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlu terus didorong. Keterlibatan yang lebih luas akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap program pembangunan desa. Dengan partisipasi yang kuat, potensi konflik dan ketidaktepatan sasaran dapat diminimalisir. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas implementasi kebijakan secara berkelanjutan. 2.) Pemerintah desa juga disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap setiap program Dana Desa, khususnya program yang dinilai kurang tepat sasaran, agar pelaksanaannya lebih efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Evaluasi tersebut perlu dilakukan secara sistematis dan berbasis data agar menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang. Perencanaan yang adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat akan memperkuat efektivitas pembagian potensi pembangunan. Di sisi lain, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup dan pendekatan yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan pendekatan berbeda atau menambahkan variabel seperti akuntabilitas keuangan dan efektivitas pengawasan. Pengembangan kajian ini penting untuk memperkaya literatur mengenai implementasi Dana Desa. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap penguatan kebijakan pembangunan desa.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, J., Sopingi, I., Hi, S., Sy, M., Setiawan, B., & Sibua, N. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed method: Buku referensi*.
- Arifin Tahir. (2020). *Kebijakan dan publik: Transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. ALFABETA cv.
- Bahri, S. (2023). Analisis kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan ekonomi masyarakat desa di Indonesia. *Musamus Journal of Public Administration*. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v5i2.5036>

- Bobihu, A., Tui, F. P., Tohopi, R., Abdussamad, J., & Nani, Y. N. (2022). Implementasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Kecamatan Bonepantai (studi kasus di Desa Tamboo Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango). *Jambura Journal of Administration and Public Service*, 2(2), 99-107.
- Damayanti, D. (2021). Implementasi program penurunan stunting melalui dana desa (study di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas). *Public Policy and Management Inquiry*, 5(1), 242-255.
- Febriyanti, S., Qamaruddin, M. Y., & Rajiman, W. (2023). Implementasi dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bassiang Kecamatan Ponrang Selatan. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 730-740.
- Firmansyah, D., Susetyo, D. P., & Sumira, M. (2020). Dampak dana desa terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 3(2), 168-181. <https://doi.org/10.32493/JABI.v3i2.y2020.p168-181>
- Gani, A., & Suparman. (2023). Administrasi publik dalam perspektif Nigro (1980). *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45-58.
- Gobel, Y. (2022). Implementasi pemanfaatan dana desa (DD) terhadap kinerja perekonomian daerah di Indonesia. *AKASYAH: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Syariah*. <https://doi.org/10.58176/akasyah.v1i1.368>
- Herdiana, D. (2018). Implementasi kebijakan publik: Konsep dan faktor penentu keberhasilan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2), 101-115.
- Hulinggi, P. A., Sulila, I., & Tohopi, R. (2020). Transparansi pengelolaan dana desa di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Administrasi dan Pelayanan Publik Jambura*, 1(1), 11-21. <https://doi.org/10.37479/jjaps.v1i1.7320>
- Natika, L., & Rinjani, S. (2022). Implementasi kebijakan program pembinaan anak terlantar (studi kasus di Dinas Sosial Kabupaten Subang). *The World of Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v4i1.1346>
- Perseveranda, M., & Lawalu, R. (2022). Analisis implementasi dana desa terhadap pembangunan infrastruktur dan partisipasi masyarakat di wilayah pedesaan. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 5(3), 201-214. <https://doi.org/10.31957/japp.v5i3.2211>
- Pitono, A., & Kartiwi. (2021). Dampak dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 10(1). <https://doi.org/10.33701/j-3p.v6i1.1534>
- Pratiwi, B., & Ohoiwutun, Y. (2023). Implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) Kampung Bumi Sahaja Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kesejahteraan Pembangunan*, 6(1), 2806. <https://doi.org/10.31957/jkp.v6i1.2806>
- Ramadhan, A., & Ma'ruf, M. (2022). Implementasi kebijakan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 145-158.
- Sulila, I. (2020). Analisis efektivitas implementasi kebijakan alokasi dana desa dan faktor-faktor penentunya di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 191-202. <https://doi.org/10.26858/jiap.v9i2.10947>

- Tohopi, R., Nani, Y. N., Tui, F. P., & Abdussamad, J. (2024). Tata kelola kebijakan dana desa dan partisipasi kultural masyarakat desa di Kabupaten Boalemo. *Dynamics of Rural Society Journal*, 2(1), 11-21. <https://doi.org/10.37905/drsj.v2i1.41>
- Yusran, A., Pananrangi, A. R., & Bahri, S. (2021). Implementasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 7(3), 210-223. p-ISSN 2442-5958 e-ISSN 2721-3132.